https://qjurnal.my.id/index.php/educurio

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA IMPLEMENTASI ASPEK MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMA NEGERI 1 MANDASTANA KABUPATEN BARITO KUALA

Guidance And Counseling Services In The Implementation Of School Based Management At SMA Negeri 1 Mandastana, Kabupaten Barito Kuala

Hadriani *

* SMA Negeri 1 Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Indonesia

*email: iyanoke3@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini membahas implementasi aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling yang terjadi di sekolah. Adapun hasilnya adalah: manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bimbingan konseling di sekolah pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi stakeholders sekolah. Seperti kelompok stakeholders adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi stakeholders dan penyusunan program BK pelaksanaannya juga meniscayakan adanya keterbukaan.

Kata Kunci:
Implementasi
manajemen berbasis sekolah
pelayanan bimbingan

Keywords:
Implementation
school-based management
counseling guidance services

Abstract

This study discusses the implementation of aspects of school-based management in counseling guidance services that occur in schools. The results are: school-based management in counseling guidance services is a management model that provides wider autonomy to schools including madrasas to manage school resources and encourage schools to increase the participation of school members and the community to achieve school goals within the framework of national education. The implementation of school-based management in counseling guidance in schools requires the cooperation and participation of school stakeholders. Such stakeholder groups are principals and their stakeholders and the preparation of the BK program in its implementation also requires openness.

PENDAHULUAN

Sebagai dasar perumusan makna manajemen pelayanan BK, terlebih dahulu dikemukakan makna manajemen secara umum. Banyak sekali pengertian manajemen dan satu pengertian tentang manajemen tidak bisa mewakili pengertian lain secara universal. Menurut T Hani Handoko (1999), tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Hal ini berarti pengertian manajemen sangat kontekstual. Mary Parker Follet yang dikutip oleh T. Hani Handoko (Tani Handoko, 1999)menyatakan bahwa "manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain." Pengertian ini mengandung arti bahwa para manajer atau pimpinan seperti kepala sekolah dan madrasah mencapai tujuan-tujuan organisasi (sekolah dan madrasah) melalui pengaturan orang-orang lain (guru-guru dan petugas administrasi) untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Sesungguhnya pengertian manajemen cukup luas sehingga tidak ada pengertian yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Pengertian manajemen yang lebih kompleks dikemukakan oleh Stoner dalam T. Hani Handoko (1999) sebagai berikut: manajemen

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pengertian, T. Hani Handoko (1999) menyimpulkan bahwa manajemen adalah: bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (con trolling).

Pelayanan bimbingan dan konseling meniscayakan manajemen agar tercapai efisiensi dan efektivitas serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setidaknya ada tiga alasan mengapa manajemen itu diperlukan kan termasuk dalam dunia pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu:

Pertama, untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai bukti bahwa proses manajemen pelayanan bimbingan konseling tepat sasaran dan sesuai tujuan.

Kedua, untuk menjaga keseinambungan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentagan (apabila ada). I Manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, saran-sasaran dan kegiatan-kegiatan apabila ada yang saling bertentangan dari pihak-pihak tertentu seperti kepala sekolah dan madrasah, para guru, tenaga administrasi, para siswa, orang tua siswa, komite sekolah dan madrasah, dan pihak-pihak lainnya.

Ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan madrasah yang efektif atau koordinator layanan BK yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan sekolah dan madrasah atau tujuan layanan BK. Menurut Peter Drucker dalam T. Hani Handoko (1999), efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing ther fight*).

METODOLOGI

Sebuah penelitian berupaya untuk memperoleh informasi yang lengkap dan begitu akurat, salah satunya mengenai adanya pengaruh yang signifikan dari kegiatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling. Dalam hal ini peneliti tidak memanipulasi variabel yang ada. Peneliti hanya mengukur variabel yang ada, maka dengan begitu penelitian ini tergolong penelitian Deskriptif. (Moore, 1983)

Didalam penelitian yang menerapkan analisis regresi, tidak jarang melibatkan lebih dari satu variabel dalam model regresinya, karena dengan hanya menggunakan satu variable bebas saja untuk menduga variabel tak bebas sering kali kurang realistis, karenanya diperlukan model regresi berganda.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi walaupun didalamnya ada variabel defenden (variabel tidak bebas, tergantung atau terikat) dan ada variabel indefenden (variabel bebas, regresor atau prediktor) namun di dalam analisisnya tidak serta merta menyatakan kausalitas. Kendal Stuart yang dikutip Gujarati (1995) mengatakan bahwa hubungan statistika hanya menunjukkan apakah ada atau tidak ada, dan bila ada bersifat kuat atau lemah, dan tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas harus berasal dari luar statistika yaitu dari landasan teori dan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Secara umum seperti telah disebutkan di atas, prinsip-prinsip manajemen meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). Prinsip-prinsip manajemen di atas apabila diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling direncanakan dan diorganisasi? Bagaimana menyusun personalia (orang-orang yang terlibat dalam pelayanan bimbingan dan konseling?), bagaimana mengarahkan dan memimpin proses pelayanan BK? dan bagaimana mengawasi atau mengevaluasi pelayanan bimbingan dan konseling? Penerapan prinsip-prinsip manajemen di atas secara terintegrasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan berkenaan dengan bagaimana secara umum pelayanan bimbingan dan konseling itu dikelola.

Pertama, perencanaan (planning). Perencanaan dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan sangat menentukan proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai suatu proses kegiatan, membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya. Agar pelayanan bimbingan dan konseling memperoleh hasil sesuai tujuan yang telah dirumuskan, maka harus dilakukan perencanaan. Di sekolah dan madrasah fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah, koordinator BK (apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki banyak tenaga atau petugas bimbingan dan konseling) dan guru BK.

Kedua, pengorganisasian (organizing). Pengorganisasian dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling dikelola dan diorganisasi. Pengelolaan dan pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan model atau pola yang dianut oleh suatu sekolah dan madrasah. Apabila sekolah dan madrasah menganut pola profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling, akan berbeda sistem pengorganisasiannya dengan sekolah dan madrasah yang menganut pola nonprofesional. Sistem pengorganisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah terten bisa diketahui dari struktur organisasi sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Dari struktur organisasi tersebut juga bisa diketahui pola dan model apa yang digunakan oleh sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya memiliki satu orang guru pembimbing, maka model organisasi pelayanan BK terintegrasi dengan organisasi sekolah dan madrasah secara umum. Tetapi apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki banyak tenaga bimbingan, maka harus disusun organisasi pelayanan BK tersendiri yang terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi pelayanan BK. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan koordinator layanan BK (apabila sekolah dan madrasah memiliki banyak petugas bimbingan).

Ketiga, penyusunan personalia (staffing). Prinsip ini dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana para personalia atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling ditetapkan, disusun dan diadakan pembagian tugas (job discription) sebagaimana telah disebutkan dalam penyusunan program BK di atas. Guru pembimbing atau konselor sekolah tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan BK kepada siswa di sekolah dan madrasah. Guru BK akan memerlukan orang lain dalam memberikan pelayanan BK. Dengan perkataan lain, pelayanan BK di sekolah dan madrasah melibatkan banyak orang. Untuk itu, harus ditentukan dan disusun para personalia atau orang-orang yang terlibat dalam layanannya agar pelaksanaannya efektif dan efisien sehingga tujuannya pun dapat dicapai secara efektif dan

efisien pula. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah bersama koordinator layanan BK, terutama apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK.

Keempat, pengarahan dan kepemimpinan (leading). Prinsip ini berkenaan dengan bagaimana mengarahkan dan memimpin para personalia layanan bimbingan dan konseling, sehingga mereka bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masin-masing. Pengarahan dan kepemimpinan diperlukan agar aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah terutama apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya memiliki satu orang guru BK. Apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK harus ditunjuk salah seorang sebagai koordinator dan yang lain sebagai angaota (staf). Selanjutnya koordinatorlah yang melaksanakan fungsi pengarahan dan kepemimpinan. Secara umum fungsi ini di sekolah dan madrasah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah.

Kelima, pengawasan (controlling). Prinsip ini dalam pelayanan konseling berkenaan dengan bagaimana melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan bimbingan dan konseling mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Pengawasan penting dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Implementasi program dalam bentuk aktivitas-aktivitas layanan BK pun perlu pengawasan dan penilaian atau evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya dan dapat diketahui pencapaian hasil-hasilnya. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya memiliki satu orang guru BK. Tetapi apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK, fungsi ini dilaksanakan oleh koordinator layanan BK sekaligus juga kepala sekolah dan madrasah.

Pola Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Sekolah dan madrasah merupakan suatu lembaga sosial. Selain itu, sekolah dan madrasah juga merupakan suatu unit kerja. Sebagai suatu unit kerja, sekolah dan madrasah dikelola atau diorganisasi menurut pola-pola atau kerangka hubungan struktural tertentu. Yang dimaksud pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling adalah kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau berbagai kedudukan dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah. Kerangka hubungan tersebut digambarkan dalam suatu struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Seperti telah disebut di muka, sekolah dan madrasah yang menganut pola profesional, akan berbeda struktur organisasinya dari pada sekolah dan madrasah yang menganut pola nonprofesional. Yang dimaksud pola profesional di sini adalah guru pembimbing di sekolah dan madrasah yang bersangkutan direkrut dari alumni BK baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3). Sedangkan, pola nonprofesional adalah guru pembimbing direkrut bukan dari alumni BK. Pola nonprofesional biasanya menempatkan kepala sekolah atau madrasah, guru mata pelajaran tertentu, atau wali kelas sebagai petugas bimbinaan.

Apabila sekolah dan madrasah menempatkan kepala sekolah atau madrasah sebabai guru pembimbing, maka pola manajemen atau struktur organisasi layanan BK; di sekolah dan madrasah yang bersangkutan akan berbeda dengan sekolah dan madrasah yang memiliki guru pembimbing tersendiri. Akan berbeda lagi apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK.

Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Sebagai penangung jawab utama pelayanan bimbingan dan konseling, koordinator mememang administrasi bimbingan, yaitu mengatur kerja sama tenaga-tenaga bimbingan dan mengarahkan semua aktivitas atau kegiatan bimbingan dan koseling di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Kordinator bersama dengan anggota-anggota staf bimbingan yang lain membentuk suatu tim kerja yang secara bersama mengusahakan pelayanan bimbingan di sekolah atau madrasah seoptimal mungkin.

Sebagai pimpinan staf bimbingan, koordinator harus memenuhi tuntutan pendidikan akademik dan harus mampu menciptakan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan bimbingan. Selain dalam berkomunikasi dengan anggota-anggota staf bimbingan, koordinator harus menunjukkan sikap menghargai dan menghormati profesionalitas rekan-rekannya serta memberikan kebebasan yang wajar kepada para tenaga bimbingan dalam menunaikan tugasnya.

Dalam mengadministrasi orang yang bekerja sebabai anggota staf bimbingan di sekolah dan madrasah, koordinator harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah dan madrasah yang bersangkutan; khususnya yang menyangkut: pengangkatan, pemberhentian, penggajian, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan tambahan atau penataran, tugas di luar sekolah atau madrasah dan sebagainya. Dalam hal di atas, koordinator bimbingan tidak diberi wewenang bertindak sendiri tanpa melalui saluran-saluran administratif yang mengikat semua tenaga kependidikan termasuk dirinya sendiri di sekolah atau madrasah yang bersangkutan.

Pembagian tugas di antara para anggota staf bimbingan, sesuai dengan jabatannya masing-masing menjadi tanggung jawab koordinator. Bagaimana sebaiknya pembagian tugas itu, sangat tergantung dari pola dasar pelaksanaan bimbingan, jumlah jabatan yang bersifat merangkap atau tidak, taraf keahlian tenaga bimbingan, dan jenis spesialisasi yang dimiliki oleh tenaga bimbingan. Selain itu, koordinator juga bertugas mengatur sarana personil dengan sebaik-baiknya.

Ada lima kemungkinan mengatur pembagian tugas antara para tenaga bimbingan di sekolah atau madrasah, khususnya di sekolah menengah, yaitu:

1. Pembimbing laki-laki melayani siswa laki-kali dan pembimbing perempuan melayani siswa perempuan.
2. Setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap tingkatan kelas tertentu, sehingga pembimbing setiap tahun pembelajaran memperoleh angkatan siswa yang baru.
3. Setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap angkatan siswa tertentu yang diikutinya terus dari saat angkatan itu masuk sekolah sampai tamat.
4. Setiap pembimbing memegang layanan-layanan bimbingan tertentu untuk seluruh angkatan siswa, misalnya pembimbing A khusus melayani semua siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, pembimbing B khusus melayani semua siswa yang akan langsung bekerja setelah tamat, dan pembimbing C menangani program testing untuk semua siswa, dan lain sebagainya.
5. Kombinasi antara poin 2 dan 4 sehingga ada beberapa pembimbing yang melayani siswa ditingkat kelas tertentu dan ada beberapa pembimbing yang memegang aspek-aspek program bimbingan tertentu.

Selain tugas-tugas di atas, koordinator bimbingan juga bertugas mengatur hubungan kerja sama di antara para tenaga bimbingan dengan tenaga pembantu administratif atau tata usaha. Dalam mengadministrasikan kegiatan-kegiatan bimbingan, sebaiknya dibedakan antara kegiatan yang menyangkut;

1. Kegiatan profesional intern di antara anggota staf bimbingan,
2. Kegiatan membina hubungan dengan masyarakat, instansi pendidikan lain, atau tenaga penunjang di luar sekolah atau madrasah yang bersangkutan,

3. Kegiatan yang berupa penulisan laporan yang harus dikerjakan oleh masing-masing tenaga bimbingan,
4. Kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pembantu administratif,
5. Kegiatan profesional ekstern yang berupa implementasi dari pelayanan bimbingan yang diberikan kepada orang lain.

Implementasi Aspek Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

1. Makna dan Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dewasa ini telah dikenal luas terutama oleh masyarakat sekolah dan madrasah. Bahkan di sekolah dan madrasah tertentu telah secara konsisten menerapkan MBS dalam pengelolaan program pendidikan atau program sekolah dan madrasah. Apabila sekolah dan madrasah telah menerapkan MBS dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran, berarti secara implisit telah menerapkan MBS dalam pelayanan bimbingan dan konseling

MBS merupakan salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan (Malik Fajar, 2002). MBS adalah pengelolaan sekolah termasuk madrasah yang menggambarkan kumpulan praktik-praktik dari banyak orang pada tingkat sekolah dan madrasah guna membuat keputusan untuk sekolah dan madrasah. MBS dimulai dari desentralisasi dengan pemberian wewenang yang jelas dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah dan madrasah dalam berbagai hal.

MBS adalah pengoordinasian dan penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok stakeholders dalam pengambilan keputusan yang partisipatif. Yang termasuk kelompok stakeholders meliputi: kepala sekolah atau madrasah dan wakil-wakilnya, guru, siswa,konselor (pembimbing), wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan, (Slamet PH, 2001). Menurut Suharsimi Arikunto (1999), MBS adalah penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada warga sekolah untuk memanfaatkan semua fasilitas dan media yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa, dan mampu mempertanggungjawabkannya secara penuh.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa MBS merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah untuk mengelola sumber daya sekolah dan madrasah, serta mendorong sekolah dan madrasah meningkatkan partisipasi warga sekolah atau madrasah dan masyarakat untuk mencapai tujuan sekolah dan madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

MBS dengan konsepsi di atas, menurut Depdiknas (2001) bertujuan antara lain untuk: (a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, inisiatif sekolah dan madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. (b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan madrasah bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, duduk bersama untuk pengambilan keputusan. (c) Meningkatkan tanggung jawab sekolah dan madrasah kepada stakeholders terutama kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.

2. Implementasi Aspek-aspek Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pelayanan Bimbingan Konseling

Berdasarkan makna MBS di atas, ada beberapa aspek yang menjadi ciri khas MBS, yaitu: (a) melibatkan semua kelompok stakeholders dalam penyusunan program sekolah dan pengambilan keputusan, (b) pengambilan keputusan secara kolektif, (c) partisipasi

atau kerja sama antara stakeholders dalam penyusunan dan penyelenggaraan program.

MBS meniscayakan kerja sama, partisipasi, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran. Ketiga aspek ini bisa diimplementasikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Artinya penyusunan dan penyelenggaraan program pelayanan BK di sekolah dan madrasah juga mensyaratkan adanya kerja sama, partisipasi, dan keterbukaan.

Penyusunan program bimbingan dan konseling dan pelaksanaannya tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau oleh petugas bimbingan sekolah dan madrasah. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pihak yang terkait di sekolah atau madrasah. Berbagai pihak yang terkait itulah yang dalam MBS disebut stakeholders. Ini artinya penyusunan program BK di sekolah atau madrasah dan pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi stakeholders sekolah dan madrasah. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa yang termasuk kelompok stakeholders adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah dan madrasah serta pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi stakeholders yang telah disebutkan di atas. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya juga meniscayakan adanya keterbukaan. Keniscayaan ini relevan dengan asas layanan bimbingan itu sendiri yang salah satunya adalah keterbukaan.

Penyusunan program BK di sekolah dan madrasah dan pelaksanaannya yang melibatkan *stakeholders* sekolah dan madrasah, diharapkan dapat mencapai peningkatan multi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah untuk mengelola sumber daya sekolah dan madrasah, serta mendorong sekolah dan madrasah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan sekolah dan madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bimbingan konseling di sekolah pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi stakeholders sekolah dan madrasah. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa yang termasuk kelompok stakeholders adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah dan madrasah serta pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi stakeholders yang telah disebutkan di atas. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya juga meniscayakan adanya keterbukaan. Keniscayaan ini relevan dengan asas layanan bimbingan itu sendiri yang salah satunya adalah keterbukaan.

REFERENSI

Arbuckle. (2004). Counseling and Psycotherapy. Boston: Allyn and Bacon, Inc

Bakran Adz Dzaky. (2004). Konseling dan Psikoterapi Islam (Penerapan Metode Sufisik). Yogyakarta: Pustaka Baru

Bimo Walgito. (1975). Bimbingan dan Penyuluh di Sekolah. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM

Cerey. (1977). Theory and Practice of Counseling and Psychoterapy. Monterey California: Brookscole Publishing Company

Dedi Supriadi. (1996). Counseling and Student Service: A collection of Selected Articles from the Internet's ERIC/CASS. Bandung: PPS FIP IKIP

Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah. (2009). Bimbingan dan konseling Islam di Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara

Furqon. (2005). Konsep dan Aplikasi Bimbingan Konseling untuk Sekolah Dasar. Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Gerald Corey. (Terjemahan E Koswara (2007). Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi. Bandung: Refika Aditama

Hackney and Cormier. (1994). Counseling Strategies and Objectives. Second Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc

Hamalik. (1992). Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru

Latifah, L. (2021). Perubahan Tingkah Laku Siswa Melalui Komunikasi Antar Pribadi Guru Pendidikan Agama Islam. Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN, 8(2), 112-126.

Mulyadi. (2010). Diagnose Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar Khusus. Yogyakarta: Nuha Litera

Muro, J Jam and Kottman, Terry. (1995). Guidance and Counseling in elementary School and Midlle School. Ioawa: Brown and Brenkmark Publisher

Ngalimun, S. P. (2012). Strategi dan Metode Pembelajaran. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Ngalimun, N., & Ihsan Mz, I. M. (2020). Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiah.

Ngalimun, N., Matin, A., & Munadi, M. (2022). Building Democratic Values in Independent Policy Learning Through Multicultural Learning Communication. Jurnal Transformatif (Islamic Studies), 6(1), 33-48.

Nugroho, A. G., & Latifah, L. (2022). PROSES PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN STRATEGI INKUIRI DALAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DENGAN HASIL KEPUASAN GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH ASSALAM MARTAPURA. AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(2).

Palmer, S and Laungani, P. (2008). Counseling in Society. London: Sage Publisher

Prayitno. (2004). Pengembangan Kompetensi dan Kebiasaan Siswa Melalui Pelayanan Konseling. Padang: Jurusan BK FKIP UNP.

Rochman Natawijaya. (1988). Peranan Guru dalam Bimbingan di Sekolah. Bandung: Abardin

Tohirin. (2011). Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.